

RINGKASAN

Win Guntur Siswandi **Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut
NIM. 217410102025 Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan
Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol**

Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.
Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.

Provinsi Aceh adalah satu-satunya provinsi yang diberikan kewenangan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk mengatur dan menerapkan Syari'at Islam sehingga memiliki regulasi yang lebih ketat terkait peredaran minuman beralkohol. Di sisi lain, hukum positif Indonesia juga memiliki regulasi terkait minuman beralkohol, meskipun cenderung lebih longgar. Berdasarkan pemahaman ini, terdapat disparitas antara Hukum Syari'at Islam di Aceh dengan Hukum Positif Indonesia.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis landasan regulasi peredaran minuman beralkohol menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol an menganalisis penyelarasan regulasi Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam peredaran minuman beralkohol di Aceh.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis normatif). Pendekatan yang dipilih ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen. Data atau bahan yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil studi menunjukkan bahwa landasan regulasi peredaran minuman beralkohol menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berbeda. Qanun Jinayat Provinsi Aceh didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam untuk menjaga jiwa, kehormatan, dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Aceh. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 bersifat lebih umum dan cenderung beraliran utilitarian (asas manfaat), menekankan pada manfaat kesehatan masyarakat, manfaat ekonomi, dan memberikan fleksibilitas regulasi di tingkat daerah. Adapun penerapannya di Provinsi Aceh tetap mengacu pada Qanun Jinayat Aceh karena otonomi khusus yang dimiliki oleh Provinsi Aceh.

Saran penelitian ini yaitu pihak perumus kebijakan perlu mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam yang menjadi dasar Qanun Jinayat Aceh dengan pendekatan utilitarian yang lebih umum dalam regulasi minuman beralkohol di Indonesia, sambil mengharmonisasikan kebijakan nasional dan otonomi daerah.

Kata Kunci: Regulasi, Peredaran Minuman Beralkohol, Qanun Jinayat Provinsi Aceh, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013

SUMMARY

Win Guntur Siswandi ***Regulation of the Distribution of Alcoholic Drinks
According to the Qanun Jinayat of Aceh Province and
Presidential Decree Number 74 of 2013 Concerning
the Control and Supervision of Alcoholic Drinks***
NIM. 217410102025

Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.
Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.

Aceh Province is the only province granted special autonomy under Law Number 11 of 2006 on Aceh Governance to regulate and implement Islamic Sharia, resulting in stricter regulations regarding the circulation of alcoholic beverages. On the other hand, Indonesia's positive law also addresses alcoholic beverages but tends to be more lenient, highlighting a disparity between Islamic Sharia law in Aceh and Indonesia's Positive Law.

This study aims to analyze the regulatory framework for the circulation of alcoholic beverages according to the Aceh Provincial Qanun Jinayat and Presidential Regulation Number 74 of 2013 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages, as well as to analyze the alignment of regulations between the Aceh Provincial Qanun Jinayat and Presidential Regulation Number 74 of 2013 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages in the circulation of alcoholic beverages in Aceh.

This research is a legal study (normative juridical). The chosen approaches are the statutory approach and the comparative approach. This study uses secondary data sources. The data collection technique in this research is conducted through document studies. The data or materials obtained are then processed and analyzed qualitatively.

The study findings indicate that the regulatory frameworks governing the circulation of alcoholic beverages under the Qanun Jinayat of Aceh Province and Presidential Regulation No. 74 of 2013 on Control and Supervision of Alcoholic Beverages are grounded in different philosophical, sociological, and juridical foundations. The Qanun Jinayat of Aceh is based on Islamic law principles aimed at preserving the soul, honor, and societal values in Acehnese society. Conversely, Presidential Regulation No. 74 of 2013 adopts a broader utilitarian approach, emphasizing public health benefits, economic benefits, and providing regulatory flexibility at the regional level. Despite this, its implementation in Aceh Province remains based on the Qanun Jinayat due to its special autonomy status.

The research recommendation suggests that policymakers should integrate the Islamic legal principles underlying the Qanun Jinayat of Aceh with a broader utilitarian approach in regulating alcoholic beverages across Indonesia, while harmonizing national policies with regional autonomy.

***Keywords: Regulations, Distribution of Alcoholic Drinks, Aceh Province Qanun
Jinayat, Presidential Regulation Number 74 of 2013***